



BUPATI KLUNGKUNG

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN BANJARANGKAN
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Klungkung Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa BAPPEDA menyampaikan seluruh Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan perkara paling lambat 1 (satu) bulan setelah perkara tentang RKPD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);

19. Peraturan Dearah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Klungkung Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 2).
21. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Klungkung
2. Daerah adalah Kabupaten Klungkung
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Klungkung adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Klungkung adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka panjang periode 2005-2025.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

RENJA KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG

Pasal 2

- (1) Renja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2021 agar dijadikan pedoman dalam :
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung untuk periode Tahun 2021; dan

- (2) Renja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dijadikan pedoman dalam :
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung untuk periode Tahun 2021; dan
 - b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2021.

Pasal 3

Camat Banjarangkan bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Renja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 7 Agustus 2020
BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 7 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



IGEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2020 NOMOR 65

DAFTAR ISI

JUDUL	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BANJARANGKAN TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Banjarangkan 2018-2023	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjarangkan	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Banjarangkan	24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANJARANGKAN	36
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Banjarangkan	36
3.3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banjarangkan dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021.....	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANJARANGKAN	40
4.1 Strategi dan Arah Kebijakan	40
4.2 Program dan Kegiatan	42
BAB V PENUTUP	57

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
KECAMATAN BANJARANGKAN
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN
2021.

RENCANA KERJA KECAMATAN BANJARANGKAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Kecamatan Banjarangkan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan Kewilayahan Kecamatan, juga berkewajiban menyusun Renja Kecamatan Banjarangkan setiap tahunnya dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Banjarangkan dan RKPD. Penyusunan renja Kecamatan Banjarangkan mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Persiapan penyusunan meliputi pembentukan dan orientasi terhadap tim penyusun, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan bahan-bahan yang diperlukan dan dilaksanakan pada November 2019. Selanjutnya dilaksanakan penyusunan rancangan awal Renja berpedoman pada Renstra Kecamatan Banjarangkan, hasil evaluasi Renja Kecamatan

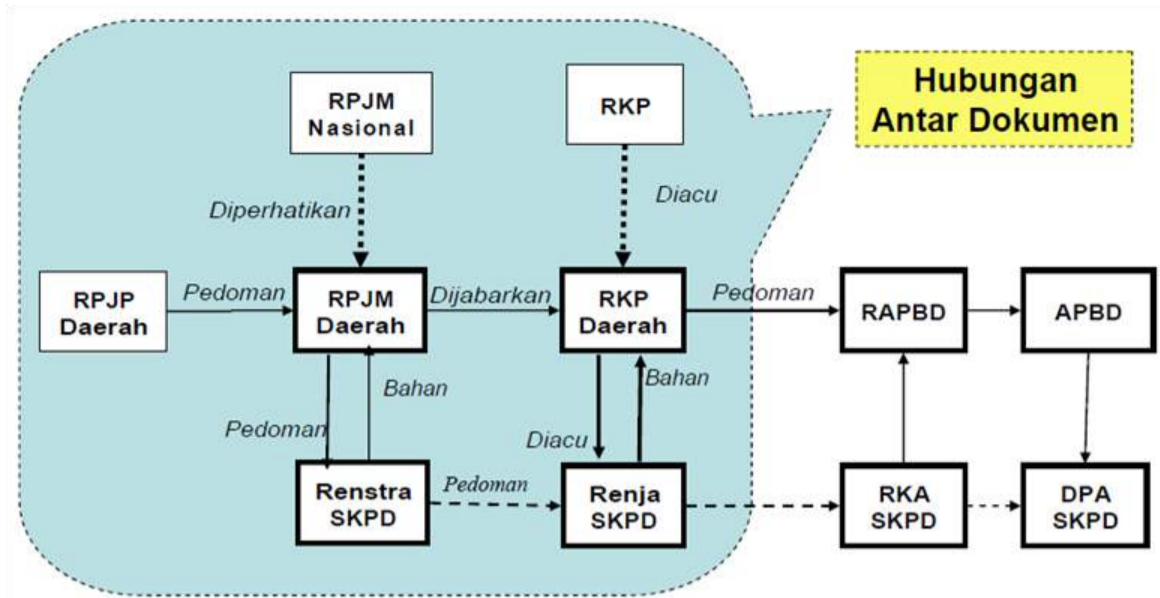
Banjarangkan tahun 2019, dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Banjarangkan tahun berjalan (2020). Penyusunan rancangan awal Renja dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Desember 2019. Berpedoman pada Renstra Kecamatan Banjarangkan bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Kecamatan Banjarangkan dengan Renstra Kecamatan Banjarangkan. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Kecamatan Banjarangkan tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Banjarangkan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Kecamatan Banjarangkan dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Banjarangkan.

Tahap penyusunan rancangan merupakan tahapan penyempurnaan rancangan awal Renja berdasarkan SE Bupati Klungkung Nomor 050/152/Baperlitbang tanggal 21 Februari 2020 tentang Pedoman Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Penyempurnaan rancangan awal renja menjadi rancangan dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Rancangan Renja Kecamatan Banjarangkan disampaikan kepada Baperlitbang selambatnya pada Minggu ketiga bulan Maret 2020 untuk diverifikasi.

Perumusan rancangan akhir Renja Kecamatan Banjarangkan merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Banjarangkan menjadi rancangan akhir Renja Kecamatan Banjarangkan berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Kecamatan Banjarangkan dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Banjarangkan berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan akhir Renja Kecamatan Banjarangkan disampaikan Camat Banjarangkan kepada Kepala Baperlitbang untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perbup tentang RKPD ditetapkan.

Kecamatan Banjarangkan menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Kecamatan Banjarangkan yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perbup paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perbup tentang RKPD ditetapkan. Setelah ditetapkan Renja Kecamatan Banjarangkan menjadi pedoman Kecamatan Banjarangkan dalam menyusun RKA Kecamatan Banjarangkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hubungan renja dengan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 1.1. Hubungan Renja dengan dokumen perencanaan dan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023;

22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2021 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Banjarangkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarangkan di bidang Kewilayahan Kecamatan selama tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarangkan dan disusun berpedoman pada Renstra Kecamatan Banjarangkan dan RKPD.

Berdasarkan maksud penyusunan Renja tersebut di atas, ditetapkan tujuan penyusunan yaitu untuk :

- a) menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Banjarangkan Tahun 2021; dan
- b) menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan di Kecamatan Banjarangkan Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan Renja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BANJARANGKAN TAHUN LALU

Menyajikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Banjarangkan, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjarangkan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Banjarangkan, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANJARANGKAN

Pada bab ini diuraikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Banjarangkan,

serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANJARANGKAN

Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BANJARANGKAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Banjarangkan 2018-2023

Berdasarkan Renja Tahun 2019, Kecamatan Banjarangkan melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang dengan bidang urusan administrasi pemerintahan melalui pelaksanaan 4 (empat) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan. Selengkapnya capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2019 adalah sebagaimana dalam Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019 dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Banjarangkan s/d Tahun 2020
Kabupaten Klungkung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)		Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
			K	Rp	K	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
							K	Rp	K	Rp	K	%			K	Rp	K	%	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																		
4 01	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																		
4 01 09	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	17,00	6.510.242.229,76	-	-	-	-	-	-	-	-	15,50	1.104.979.833,76	11,74	482.353.931,00	69,06	18,61	
		Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	-		100,00	621.766.749,00	100,00	789.456.676,00	98,01	728.956.306,00	98,01	92,34	-	-	-	-	-	-	
4 01 09 01	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	97,00	5.425.923.601,76	95,00	379.015.777,00	96,00	594.137.612,00	96,00	537.031.926,00	100,00	90,39	96,00	882.816.077,76	89,01	389.449.446,00	91,76	17,08	
4 01 09 02	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	90,00	885.623.628,00	75,00	146.676.472,00	80,00	167.928.064,00	46,57	165.159.880,00	58,21	98,35	82,00	182.116.756,00	94,87	72.165.985,00	105,41	26,80	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)		Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	K	%
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11	
4 01 09 03	Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	100,00	30.610.000,00	100,00	3.175.000,00	100,00	3.730.000,00	100,00	3.103.500,00	100,00	83,20	100,00	6.122.000,00	100,00	3.398.000,00	100,00	21,24
4 01 09 04	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	49,00	30.675.000,00	9,00	3.590.000,00	9,00	3.944.000,00	9,00	3.944.000,00	100,00	100,00	8,00	6.357.000,00	17,00	2.644.500,00	34,69	21,48
4 01 09 05	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	122,00	31.290.000,00	22,00	3.839.000,00	22,00	4.019.000,00	22,00	4.019.000,00	100,00	100,00	22,00	6.480.000,00	34,00	3.185.000,00	27,87	23,02
4 01 09 06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	80,00	106.120.000,00	12,00	85.470.500,00	12,00	15.698.000,00	12,00	15.698.000,00	100,00	100,00	14,00	21.088.000,00	19,00	11.511.000,00	23,75	25,64
4 01 64	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	100,00	4.744.973.800,00	95,00	723.194.671,48	95,00	520.463.500,00	100,00	518.685.000,00	105,26	99,66	96,00	2.160.234.700,00	53,68	226.074.372,00	53,68	15,70
4 01 64 02	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati	20,00	1.743.915.000,00	2,00	294.683.000,00	2,00	314.095.000,00	2,00	313.920.000,00	100,00	99,94	4,00	353.993.000,00	3,00	7.273.000,00	15,00	18,42
4 01 64 03	Kegiatan Penyelenggaraan Porsenijar Tingkat Kecamatan	Persentase Cabang Olah Raga dan Seni Yang Dipertandingkan	100,00	505.917.000,00	100,00	71.869.000,00	100,00	83.375.000,00	100,00	83.375.000,00	100,00	100,00	100,00	104.708.000,00	100,00	102.813.000,00	100,00	36,80
4 01 64 04	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah sesuai Standar	Persentase Sekolah Melaksanakan UKS Sesuai Standar	100,00	63.525.000,00	100,00	6.532.000,00	100,00	4.017.000,00	100,00	4.017.000,00	100,00	100,00	100,00	12.535.000,00	100,00	3.388.000,00	100,00	11,66

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)		Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	K	%
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11	
4.01.64.05	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	100,00	231.015.000,00	100,00	6.783.000,00	100,00	24.882.000,00	100,00	24.106.000,00	100,00	96,88	100,00	45.873.000,00	69,25	7.773.000,00	69,25	13,80
4.01.64.06	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan	6,00	104.833.000,00	1,00	14.515.500,00	1,00	15.076.500,00	1,00	15.076.500,00	100,00	100,00	1,00	20.653.000,00	2,00	15.101.000,00	33,33	28,79
4.01.64.07	Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan	Buku Rekapitulasi Profil Desa dan Buku Potensi Kecamatan	10,00	61.212.800,00	2,00	3.358.000,00	2,00	3.650.000,00	2,00	3.650.000,00	100,00	100,00	2,00	14.184.700,00	2,00	7.331.000,00	20,00	17,94
4.01.64.08	Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Bulan Lapangan Kecamatan Dalam Kondisi Baik	72,00	1.678.401.000,00	12,00	292.060.171,48	12,00	31.839.000,00	12,00	31.651.500,00	100,00	99,41	12,00	1.535.681.000,00	18,00	61.908.372,00	25,00	5,57
4.01.64.09	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	100,00	115.665.000,00	100,00	3.150.000,00	100,00	10.578.000,00	100,00	10.578.000,00	100,00	100,00	100,00	24.509.000,00	43,00	9.509.000,00	43,00	17,37
4.01.64.11	Kegiatan Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial	Data Kerawanan Sosial di Kecamatan	14,00	195.245.000,00	4,00	26.404.000,00	2,00	28.295.000,00	2,00	27.655.000,00	100,00	97,74	2,00	39.049.000,00	2,00	8.954.000,00	14,29	18,75
4.01.64.12	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	100,00	45.245.000,00	100,00	3.840.000,00	100,00	4.656.000,00	100,00	4.656.000,00	100,00	100,00	100,00	9.049.000,00	49,50	2.024.000,00	49,50	14,76

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)		Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	K	%
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11	
4 01 65	Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,00	166.479.000,00	80,00	25.587.000,00	100,00	25.396.000,00	100,00	18.196.000,00	100,00	71,65	100,00	28.819.000,00	100,00	10.092.500,00	100,00	16,99
4 01 65 01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Layanan Sesuai SOP	100,00	166.479.000,00	100,00	25.587.000,00	100,00	25.396.000,00	100,00	18.196.000,00	100,00	71,65	100,00	28.819.000,00	100,00	10.092.500,00	100,00	16,99
4 01 66	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	100,00	994.343.500,00	100,00	166.786.800,00	100,00	158.588.500,00	100,00	146.714.900,00	100,00	92,51	100,00	193.260.500,00	100,00	41.116.100,00	100,00	18,99
4 01 66 01	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Tertib Administrasi	13,00	341.988.000,00	13,00	43.769.600,00	13,00	45.573.600,00	13,00	37.669.600,00	100,00	82,66	13,00	64.175.600,00	13,00	10.464.700,00	100,00	14,07
4 01 66 02	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa	Persentase SK Evaluasi APBDes Tepat Waktu	100,00	191.065.500,00	100,00	44.906.000,00	100,00	32.846.900,00	100,00	28.877.300,00	100,00	87,91	100,00	37.286.900,00	0,00	8.194.400,00	0,00	19,40
4 01 66 03	Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu	Persentase Jenis Lomba Yang Diikuti	100,00	68.045.000,00	100,00	10.084.000,00	100,00	5.660.000,00	100,00	5.660.000,00	100,00	100,00	100,00	13.379.000,00	100,00	4.561.000,00	100,00	15,02
4 01 66 04	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	100,00	393.245.000,00	100,00	68.027.200,00	100,00	74.508.000,00	100,00	74.508.000,00	100,00	100,00	100,00	78.419.000,00	50,00	17.896.000,00	50,00	23,50

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan tabel 2.1 di atas terdapat 1 (satu) program dengan realisasi yang tidak memenuhi target kinerja yaitu Program Pelayanan Kesekretariatan dengan indikator kinerja persentase rata-rata capaian output kegiatan, tingkat realisasinya sebesar 98,01% dari target sebesar 100%. Sedangkan kegiatan dengan realisasi yang tidak memenuhi target kinerja yaitu Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD dengan indikator kinerja capaian disiplin aparatur dimana target yang ditetapkan sebesar 80% terealisasi sebesar 46,57% sehingga tingkat realisasinya sebesar 58,21%.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 4 program yang dilaksanakan sampai Triwulan IV tahun 2019 yang telah memenuhi target kinerja sebesar 100% sebanyak 2 program yaitu; Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan dan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Sedangkan dari 21 kegiatan yang dilaksanakan dan telah memenuhi target kinerja sebesar 100% sebanyak 20 kegiatan yaitu; Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur; Kegiatan Pengelolaan Kearsipan; Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD; Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD; Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD; Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah; Kegiatan Penyelenggaraan Porsenijar Tingkat Kecamatan; Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah sesuai Standar; Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan; Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan; Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan; Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga; Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ekonomi dan Pembangunan; Kegiatan Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial; Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketentraman dan Ketertiban; Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa; Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu; dan Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Diantara yang mencapai target, terdapat 1 (satu) program yang melebihi target kinerja yaitu Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerja rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan, dimana tingkat realisasi mencapai 105,26% (sangat tinggi) dari target sebesar 90% realisasinya mencapai 100%.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program Pelayanan Kesekretariatan dengan indikator kinerja persentase rata-rata capaian output kegiatan ialah terdapatnya satu kegiatan yang realisasinya atau output kegiatannya tidak mencapai target kinerja. Sedangkan tidak tercapainya target kinerja Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD disebabkan oleh faktor tingkat disiplin pegawai yang masih kurang.

Faktor penyebab/pendorong terpenuhinya target kinerja program/kegiatan sebesar 100% adalah koordinasi antar bidang yang semakin baik dan terbangunnya komitmen dan kerja sama antar aparatur terbina dengan baik. Begitupula program yang target kinerjanya melebihi target yaitu Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan lebih didorong oleh faktor partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah cukup baik serta terbina koordinasi dan komunikasi yang baik antara instansi se-Kecamatan Banjarangkan.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Banjarangkan

Dengan Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Banjarangkan sampai Triwulan IV tahun 2019, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Banjarangkan sampai dengan tahun berjalan telah mencapai sebesar 80,68% (tinggi).

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

- a. PPTK agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi pencapaian kinerja dan realisasi anggarannya sesuai jadwal anggaran kas yang direncanakan untuk meningkatkan daya serap anggaran;
- b. Agar realisasi pelaksanaan program/kegiatan dapat diukur dengan baik, PPTK direkomendasikan melakukan evaluasi capaian kinerja dan identifikasi kendala dan hambatan termasuk indikator kinerja, serta meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

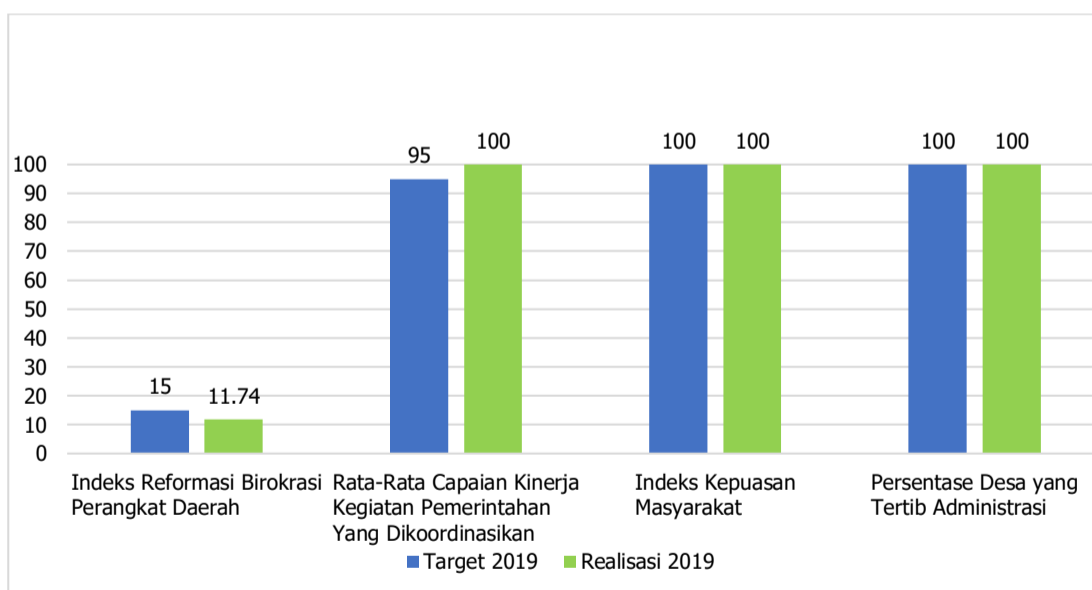
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjarangkan

Kecamatan Banjarangkan sebagai perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan Unsur Kewilayahan dengan bidang urusan Kecamatan fokus pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditunjang dengan memenuhi kebutuhan pelayanan kesekretariatan, meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, meningkatkan layanan publik di kecamatan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kinerja Kecamatan Banjarangkan tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran periode tahun 2019 sebagai berikut :

1. Sasaran Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dimana capaian tahun 2019 sebesar 11,74 poin dari target 15 poin.
2. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan, dimana capaian tahun 2019 sebesar 100% dari target 95%.
3. Sasaran Meningkatnya Layanan Publik di Kecamatan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, dimana capaian tahun 2019 sebesar 100% dari target 100%.
4. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi, dimana capaian tahun 2019 sebesar 100% dari target 100%.

Pencapaian sasaran-sasaran Kecamatan Banjarangkan periode tahun 2019 sebagaimana grafik berikut.



Gambar 2.1 Pencapaian Indikator sasaran Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019.

Kinerja pelayanan Kecamatan Banjarangkan secara rinci dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan dalam periode Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjarangkan
Kabupaten Klungkung

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik											
	Indeks Kualitas Pelayanan Publik			3,35 Poin	3,37 Poin	3,38 Poin	3,39 Poin	3,35 Poin	3,60 Poin	3,38 Poin	3,39 Poin	
I	Sasaran Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan											
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			15 poin	15,50 poin	16 poin	16,50 poin	11,74 poin	11,74 poin	16 poin	16,50 poin	
1	Program Pelayanan Kesekretariatan											Program tahun 2018, 2019, 2020 dan Renstra 2018-2023
	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan			100%	-	-	-	98,01%	-	-	-	
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			-	15,50 poin	-	-	-	11,74 poin	-	-	
	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1.1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			96%	96%	-	-	96%	89,01%	-	-	
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD											
1.2	Capaian Disiplin Aparatur			80%	82%	-	-	46,57%	94,87%	-	-	
	Kegiatan Pengelolaan Kearsipan											

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
1.4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD											
	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu			9 dokumen	8 dokumen	-	-	9 dokumen	8 dokumen	-	-	
1.5	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD											
	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu			22 dokumen	22 dokumen	-	-	22 dokumen	12 dokumen	-	-	
1.6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD											
	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu			12 dokumen	14 dokumen	-	-	12 dokumen	7 dokumen	-	-	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Program tahun 2021
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			-	-	16 poin	16,50 poin	-	-	16 poin	16,50 poin	
2.1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Tepat Waktu			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
2.2	Kegiatan Administrasi Keuangan											
	Rata-Rata Capaian Output Sub Kegiatan Administrasi Keuangan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
2.3	Kegiatan Administrasi Umum											
	Rata-Rata Capaian Output Sub Kegiatan Administrasi Umum			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
	Capaian Disiplin Aparatur			-	-	85%	87%	-	-	85%	87%	
II	Sasaran Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan											
	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan			95%	96%	98%	99%	100%	53,68%	98%	99%	
1	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan											Program tahun 2018, 2019, 2020 dan Renstra 2018-2023
	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan			95%	96%	-	-	100%	53,68%	-	-	
1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah											
	Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati			2 kali	4 kali	-	-	2 kali	1 kali	-	-	
1.2	Kegiatan Penyelenggaraan Porsenijar Tingkat Kecamatan											
	Persentase Cabang Olah Raga dan Seni Yang Dipertandingkan			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
1.3	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah sesuai Standar											
	Persentase Sekolah Melaksanakan UKS Sesuai Standar			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
1.4	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan											

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi			100%	100%	-	-	100%	69,25%	-	-	
	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan											
1.6	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan			1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	-	
	Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan											
1.7	Buku Rekapitulasi Profil Desa dan Buku Potensi Kecamatan			2 buku	2 buku	-	-	2 buku	-	-	-	
	Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga											
1.8	Jumlah Bulan Lapangan Kecamatan Dalam Kondisi Baik			12 bulan	12 bulan	-	-	12 bulan	6 bulan	-	-	
	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ekonomi dan Pembangunan											
1.9	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi			100%	100%	-	-	100%	43%	-	-	
	Kegiatan Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial											
1.10	Data Kerawanan Sosial di Kecamatan			2 data	2 data	-	-	2 data	-	-	-	
	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketentraman dan Ketertiban											
	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi			100%	100%	-	-	100%	49,50%	-	-	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum											Program tahun 2021
	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
2.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											
	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
2.2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada											
	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang Disidangkan			-	-	0 Kasus	0 Kasus	-	-	0 Kasus	0 Kasus	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum											Program tahun 2021
	Persentase Capaian Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											
	Cakupan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
III	Sasaran Meningkatnya Layanan Publik di Kecamatan											
	Indeks Kepuasan Masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan											Program tahun 2018, 2019, 2020 dan Renstra 2018-2023
	Indeks Kepuasan Masyarakat			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
1.1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan											
	Persentase Layanan Sesuai SOP			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik											Program tahun 2021
	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											
	Cakupan Kegiatan Koordinasi Pemerintahan Bidang Sosial Budaya Yang Difasilitasi			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
2.3	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum											

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Lapangan Kecamatan Dalam Kondisi Baik			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
2.4	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
IV	Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan											
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan											Program tahun 2018, 2019, 2020 dan Renstra 2018-2023
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											
	Jumlah Desa Tertib Administrasi			13 desa	13 desa	-	-	13 desa	13 desa	-	-	
	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa											
	Persentase SK Evaluasi APBDes Tepat Waktu			100%	100%	-	-	100%	-	-	-	
	Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu											

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Jenis Lomba Yang Diikuti			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi			100%	100%	-	-	100%	50%	-	-	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan											Program tahun 2021
	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
2.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											
	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											Program tahun 2021
	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
3.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											
	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	

Dari tabel 2.4 dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja dari tahun 2018 sampai dengan 2019 diatas 90% hal ini dikarenakan aparat seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Banjarangkan berusaha untuk merealisasikan seluruh kegiatan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Banjarangkan

2.3.1. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan gambaran capaian kinerja pelayanan Kecamatan Banjarangkan pada periode Renja sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Banjarangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Tabel 2.3
Permasalahan dan Akar Masalah Bidang Urusan Kecamatan

Bidang Urusan	Masalah	Akar Masalah
I. Kecamatan	1. Belum Optimalnya Perencanaan dan Kinerja OPD	a. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan OPD
		b. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja OPD
	2. Belum Optimalnya Akuntabilitas Keuangan OPD	Penyampaian laporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum akurat dan tepat waktu
	3. Belum Optimalnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Perkantoran	a. Belum tertatanya arsip dengan baik
		b. Sarana dan Prasarana Aparatur kurang memadai
	4. Tingkat Disiplin Pegawai Masih Kurang	Kurangnya pemahaman pegawai akan peraturan kepegawaian
	5. Belum Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Belum optimalnya penyediaan informasi dan data kerawanan sosial
	6. Masih Banyaknya Pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada
7. Belum Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Belum optimalnya peringatan hari-hari besar nasional dan daerah	
8. Belum Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	a. Belum optimalnya sekolah melaksanakan UKS sesuai standar	

Bidang Urusan	Masalah	Akar Masalah
		b. Masih minimnya bibit atlit olah raga di kecamatan
	9. Belum Optimalnya Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
	10. Belum Optimalnya Pemeliharaan Lapangan Umum Kecamatan	Lapangan umum kecamatan belum memiliki sarana yang memadai
	11. Belum Optimalnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin
		b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
	12. Belum Optimalnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan	a. Belum maksimalnya usulan rencana pembangunan kecamatan yang terakomodir
		b. Belum optimalnya kegiatan posyandu
	13. Pemerintahan Desa Kurang Tertib Administrasi	a. Belum optimalnya penyusunan APBDesa
		b. Kurangnya pemahaman perangkat desa akan peraturan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa yang selalu berubah
		c. Kesiapan desa mengikuti lomba belum optimal;
		d. Belum optimalnya penyusunan profil desa dan potensi kecamatan

Permasalahan-permasalahan tersebut, jika tidak diatasi akan memberikan dampak tidak tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati yaitu terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik dengan tujuan terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, responsif, santun dan inovatif serta sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan target yang ditetapkan Kecamatan Banjarnagkan pada tahun 2021 sebesar 3,38 poin.

2.3.2. Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan Kecamatan Banjarnagkan

Tantangan yang dihadapi dan kemungkinan akan dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Banjarnagkan adalah sebagai berikut :

- a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri di era globalisasi, kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi, dimana efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjarangkan serta pelayanan kepada masyarakat menuntut penerapan teknologi informasi.
- b. Dinamika peraturan perundangan yang menuntut adaptasi yang cepat. Hal ini menuntut pemahaman aparatur akan peraturan perundangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarangkan.
- c. Kuantitas dan kualitas SDM pada Kecamatan Banjarangkan kurang memadai. Hal ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarangkan.

Sedangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan Kecamatan Banjarangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah cukup baik. Hal ini sangat diharapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta program/kegiatan Kecamatan Banjarangkan.
- b. Terbinanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara instansi se-Kecamatan Banjarangkan. Hal ini sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarangkan dalam menyelenggarakan urusan Kewilayahan Kecamatan.
- c. Komitmen dan kerja sama antar aparatur terbina dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarangkan dalam keterbatasan SDM yang dimiliki.

2.3.3. Isu-Isu Strategis Pelayanan Kecamatan Banjarangkan

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Berdasarkan identifikasi permasalahan, analisis dampak serta tantangan dan peluang maka dirumuskan isu-isu strategis penyelenggaraan bidang urusan Kewilayahan Kecamatan sebagai berikut :

- a. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan indeks baik menjadi hal penting bagi Kecamatan Banjarangkan dalam mendukung pencapaian Misi 4 RPJMD yang bertujuan terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, responsif, santun dan inovatif.
- b. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Banjarangkan. Dalam melaksanakan urusan Unsur Kewilayahan Kecamatan maka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang optimal di Kecamatan Banjarangkan menjadi hal penting.

- c. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Banjarangkan.
Pelaksanaan urusan Unsur Kewilayahan Kecamatan perlu didukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Banjarangkan melalui koordinasi yang optimal.
- d. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Banjarangkan.
Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan menjadi salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarangkan.
- e. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Banjarangkan.
Pelaksanaan urusan Unsur Kewilayahan Kecamatan perlu didukung terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa di Kecamatan Banjarangkan yang optimal.
- f. Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan Desa di Kecamatan Banjarangkan.
Tertib administrasi adalah hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, untuk itu diperlukan upaya meningkatkan pemahaman dan kemampuan tentang peraturan dan administrasi pemerintahan desa bagi perangkat desa di Kecamatan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2021, Kecamatan Banjarangkan merancang program dan kegiatan yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2021. Terhadap rancangan awal RKPD tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil analisis kebutuhan untuk memastikan kesesuaian program dan kegiatan yang dirancang dalam Rancangan Renja Tahun 2021 dengan Rancangan RKPD Tahun 2021. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Klungkung

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Banjarangkan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	UNSUR KEWILAYAHAN				3.620.573.717,00	UNSUR KEWILAYAHAN				3.620.573.717,00	
	KECAMATAN				3.620.573.717,00	KECAMATAN				3.620.573.717,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banjarangkan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	16 Poin	3.245.048.217,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banjarangkan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	16 Poin	3.245.048.217,00	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Tepat Waktu	100 Persen	7.326.300,00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Tepat Waktu	100 Persen	7.326.300,00	
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kecamatan Banjarangkan	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	8 Dokumen	3.810.600,00	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kecamatan Banjarangkan	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	8 Dokumen	3.810.600,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banjarangkan	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	22 Dokumen	3.515.700,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banjarangkan	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	22 Dokumen	3.515.700,00	
	Administrasi Keuangan	Kecamatan Banjarangkan	Rata-Rata Capaian Output Sub Kegiatan Administrasi Keuangan	100 Persen	2.754.769.729,00	Administrasi Keuangan	Kecamatan Banjarangkan	Rata-Rata Capaian Output Sub Kegiatan Administrasi Keuangan	100 Persen	2.754.769.729,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banjarangkan	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	2.655.737.229,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banjarangkan	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	2.655.737.229,00	
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Kecamatan Banjarangkan	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	14 Dokumen	99.032.500,00	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Kecamatan Banjarangkan	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	14 Dokumen	99.032.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum	Kecamatan Banjarangkan	Rata-Rata Capaian Output Sub Kegiatan Administrasi Umum	100 Persen	298.475.720,00	Administrasi Umum	Kecamatan Banjarangkan	Rata-Rata Capaian Output Sub Kegiatan Administrasi Umum	100 Persen	298.475.720,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	100 Persen	2.487.900,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	100 Persen	2.487.900,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	97 Persen	295.987.820,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	97 Persen	295.987.820,00	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Banjarangkan	Capaian Disiplin Aparatur	85 Persen	184.476.468,00	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Banjarangkan	Capaian Disiplin Aparatur	85 Persen	184.476.468,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Pelaksanaan Peraturan Kepegawaian	100 Persen	184.476.468,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Pelaksanaan Peraturan Kepegawaian	100 Persen	184.476.468,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banjarangkan	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan	100 Persen	202.690.600,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banjarangkan	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan	100 Persen	202.690.600,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	100 Persen	134.929.600,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	100 Persen	134.929.600,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Sekolah Melaksanakan UKS Sesuai Standar	100 Persen	4.461.500,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Sekolah Melaksanakan UKS Sesuai Standar	100 Persen	4.461.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Cabang Olah Raga dan Seni Yang Dipertandingkan Dalam Porsenijar Kecamatan	100 Persen	130.468.100,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Cabang Olah Raga dan Seni Yang Dipertandingkan Dalam Porsenijar Kecamatan	100 Persen	130.468.100,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Pemerintahan Bidang Sosial Budaya Yang Difasilitasi	100 Persen	8.943.800,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Pemerintahan Bidang Sosial Budaya Yang Difasilitasi	100 Persen	8.943.800,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	Kegiatan Koordinasi Pemerintahan Bidang Sosial Budaya Yang Difasilitasi	4 Kegiatan	8.943.800,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	Kegiatan Koordinasi Pemerintahan Bidang Sosial Budaya Yang Difasilitasi	4 Kegiatan	8.943.800,00	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Lapangan Kecamatan Dalam Kondisi Baik	100 Persen	35.110.400,00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Lapangan Kecamatan Dalam Kondisi Baik	100 Persen	35.110.400,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Banjarangkan	Jumlah Bulan Lapangan Kecamatan Dalam Kondisi Baik	12 Bulan	35.110.400,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Banjarangkan	Jumlah Bulan Lapangan Kecamatan Dalam Kondisi Baik	12 Bulan	35.110.400,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Banjarangkan	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	23.706.800,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Banjarangkan	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	23.706.800,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Kecamatan Banjarangkan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 Persen	15.355.100,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Kecamatan Banjarangkan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 Persen	15.355.100,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Banjarangkan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Pemerintahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yang Difasilitasi	100 Persen	8.351.700,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Banjarangkan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Pemerintahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yang Difasilitasi	100 Persen	8.351.700,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 Persen	82.309.900,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 Persen	82.309.900,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Banjarangkan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	100 Persen	82.309.900,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Banjarangkan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	100 Persen	82.309.900,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Banjarangkan	Dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	13.804.600,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Banjarangkan	Dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	13.804.600,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Pelaksanaan Posyandu di Kecamatan	100 Persen	68.505.300,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Pelaksanaan Posyandu di Kecamatan	100 Persen	68.505.300,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banjarangkan	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	23.789.800,00	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banjarangkan	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	23.789.800,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banjarangkan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	100 Persen	19.927.800,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banjarangkan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	100 Persen	19.927.800,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	Data Kerawanan Sosial di Kecamatan	2 Data	19.927.800,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	Data Kerawanan Sosial di Kecamatan	2 Data	19.927.800,00	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Kecamatan Banjarangkan	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang Disidangkan	0 Kasus	3.862.000,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Kecamatan Banjarangkan	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang Disidangkan	0 Kasus	3.862.000,00	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Banjarangkan	Cakupan Kegiatan Koordinasi/Sinergi Yang Difasilitasi	100 Persen	3.862.000,00	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Banjarangkan	Cakupan Kegiatan Koordinasi/Sinergi Yang Difasilitasi	100 Persen	3.862.000,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 Persen	26.443.300,00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 Persen	26.443.300,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Banjarangkan	Cakupan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100 Persen	26.443.300,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Banjarangkan	Cakupan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100 Persen	26.443.300,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Banjarangkan	Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati	4 Kali	26.443.300,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Banjarangkan	Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati	4 Kali	26.443.300,00	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	100 Persen	40.291.900,00	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	100 Persen	40.291.900,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Banjarangkan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	100 Persen	40.291.900,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Banjarangkan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	100 Persen	40.291.900,00	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Banjarangkan	Persentase SK Evaluasi APBDes Tepat Waktu	100 Persen	17.358.200,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Banjarangkan	Persentase SK Evaluasi APBDes Tepat Waktu	100 Persen	17.358.200,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Banjarangkan	Jumlah Desa Tertib Administrasi	13 Desa	12.695.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Banjarangkan	Jumlah Desa Tertib Administrasi	13 Desa	12.695.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Jenis Lomba Desa Yang Diikuti	100 Persen	5.559.500,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Banjarangkan	Persentase Jenis Lomba Desa Yang Diikuti	100 Persen	5.559.500,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Banjarangkan	Buku Rekapitulasi Profil Desa dan Buku Potensi Kecamatan	2 Buku	4.679.200,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Banjarangkan	Buku Rekapitulasi Profil Desa dan Buku Potensi Kecamatan	2 Buku	4.679.200,00	
TOTAL					3.620.573.717,00						3.620.573.717,00

Analisis berdasarkan tabel 2.4 diatas dapat dijelaskan bahwa rancangan awal RKPD telah sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Banjarangkan dan menjadi rancangan akhir Renja Kecamatan Banjarangkan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka penyusunan Renja Tahun 2021 Kecamatan Banjarangkan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung yang bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan Kabupaten Klungkung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarangkan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan untuk penyempurnaan Rancangan Awal Renja.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANJARANGKAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021 yakni “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”, dengan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 sesuai dengan RPJMN adalah:

1. Tingkat kemiskinan pada kisaran 6,0 – 7,0 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 6,0 persen;
3. Indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi 75,54;
4. Gini rasio pada kisaran 0,360 – 0,374;
5. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,6 – 4,3 persen.

Untuk mencapai sasaran dan target pembangunan nasional tersebut ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Kecamatan Banjarangkan sebagai pelaksanan urusan Unsur Kewilayahan di bidang urusan Kecamatan sangat terkait dengan pencapaian target-target tersebut melalui peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Banjarangkan

3.2.1. Tujuan Renja dan Target Tahun 2021

Kecamatan Banjarangkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama mendukung pelaksanaan misi 4 yaitu terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian

hukum dan stabilitas politik. Misi 4 memiliki tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang sangat terkait dengan fungsi Kecamatan Banjarangkan dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Berkaitan hal tersebut ditetapkan tujuan Renja Kecamatan Banjarangkan yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator tujuan indeks kualitas pelayanan publik, dengan target 3,38 poin untuk tahun 2021. Tujuan, indikator dan target kinerja Kecamatan Banjarangkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Banjarangkan
Tahun 2021

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kualitas pelayanan publik	3,38 poin

3.2.2. Sasaran Renja dan Target Tahun 2021

Untuk mencapai tujuan dan target kinerja tujuan Kecamatan Banjarangkan Tahun 2021, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarangkan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Banjarangkan Tahun 2018-2023 ditetapkan sasaran, indikator kinerja dan targetnya untuk tahun 2021 sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan.
Indikator kinerja sasaran ini ialah indeks reformasi birokrasi perangkat daerah dengan target tahun 2021 sebesar 16 poin. Sasaran ini didasarkan atas isu strategis yaitu belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah.
2. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.
Indikator kinerja sasaran ini ialah rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan target tahun 2021 sebesar 98 persen. Sasaran ini didasarkan atas isu strategis yaitu belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Banjarangkan dan belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Banjarangkan.
3. Meningkatnya Layanan Publik di Kecamatan.
Indikator kinerja sasaran ini ialah indeks kepuasan masyarakat dengan target tahun 2021 sebesar 100 persen. Sasaran ini didasarkan atas isu

strategis yaitu belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banjarangkan.

4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
Indikator kinerja sasaran ini ialah persentase Desa yang tertib administrasi dengan target tahun 2021 sebesar 100 persen. Sasaran ini didasarkan atas isu strategis yaitu belum optimalnya pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Banjarangkan dan belum optimalnya kinerja Pemerintahan Desa di Kecamatan Banjarangkan.

Sasaran Renja Kecamatan Banjarangkan dengan indikator kinerja dan targetnya untuk tahun 2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Banjarangkan
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021
1	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (point)	16,00
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan (%)	98,00
3	Meningkatnya Layanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	100,00
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi (%)	100,00

3.3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banjarangkan dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021

Berdasarkan sasaran dan target kinerja di atas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Banjarangkan Tahun 2021 yang merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarangkan, dan sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, kinerja Kecamatan Banjarangkan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD). Untuk lebih jelasnya IKU dan IKD Kecamatan Banjarangkan tahun 2021 sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Sasaran, Indikator dan Target Kinerja IKU Kecamatan Banjarangkan dan
IKD Kabupaten Klungkung Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Target Tahun 2021	
				IKU	IKD
1	Terpenuhinya Pelayanan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (poin)	17,00	16,00	-
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan (%)	100,00	98,00	98,00
3	Meningkatnya Layanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	100,00	100,00	100,00
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi (%)	100,00	100,00	100,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANJARANGKAN

4.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran tersebut, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Banjarangkan Tahun 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (poin)	Mengoptimalkan perencanaan dan kinerja OPD	Penyediaan dokumen perencanaan dan anggaran OPD yang optimal
					Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja OPD secara berkualitas
				Mengoptimalkan akuntabilitas keuangan OPD	Memenuhi gaji dan tunjangan ASN
					Penyusunan dan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban keuangan yang akurat dan tepat waktu
				Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran	Penataan dan pengelolaan kearsipan sesuai klasifikasi
					Penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
		Meningkatkan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Pembinaan pegawai tentang peraturan kepegawaian		
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan (%)	Mengoptimalkan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Penyediaan informasi dan data kerawanan sosial di Kecamatan yang berkualitas
				Mengoptimalkan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan	Sosialisasi kepatuhan terhadap Perda dan Perkada kepada masyarakat di Kecamatan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
				Mengoptimalkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di Kecamatan	Mengoptimalkan peringatan hari-hari besar nasional dan daerah di Kecamatan
		Meningkatnya layanan publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (%)	Mengoptimalkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Meningkatkan pembinaan UKS di sekolah sesuai standar
				Mengoptimalkan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	Meningkatkan pembinaan bibit atlet olah raga di Kecamatan
				Mengoptimalkan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
				Mengoptimalkan pemeliharaan lapangan umum Kecamatan	Penyediaan sarana dan prasarana olah raga di lapangan umum Kecamatan yang memadai
				Mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Meningkatkan pelaksanaan pelayanan PATEN di Kecamatan sesuai SOP
					Meningkatkan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat di Kecamatan
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang tertib administrasi	Mengoptimalkan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan	Penyediaan dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan yang berkualitas melalui pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
					Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kegiatan Posyandu
				Meningkatkan pemahaman dan kemampuan tentang peraturan dan administrasi pemerintahan desa	Penyediaan SK evaluasi APBDesa yang tepat waktu melalui pembinaan dan evaluasi penyusunan APBDesa kepada perangkat Desa

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
					Meningkatkan pemahaman dan kemampuan perangkat desa melalui pembinaan akan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan Desa yang tertib administrasi
					Meningkatkan koordinasi dan pembinaan lomba Desa
					Penyediaan buku rekapitulasi profil Desa dan buku potensi Kecamatan yang berkualitas melalui pembinaan kepada perangkat Desa

4.2. Program dan Kegiatan

Dalam upaya mewujudkan target kinerja tujuan, sasaran dan penerapan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Banjarangkan Tahun 2021 dirumuskan program kegiatan dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

a. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan tugas dan fungsinya Kecamatan Banjarangkan mendukung pencapaian Misi 4 RPJMD yaitu terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik, dengan tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif. Untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut ditetapkan tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator tujuan adalah indeks kualitas pelayanan publik sebesar 3,38 poin di tahun 2021.

b. Pencapaian program prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2018-2023.

Sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Banjarangkan mendukung capaian program prioritas 4 yaitu Percepatan reformasi birokrasi untuk

mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif. Hal ini terkait dengan sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan dengan indikator sasaran indeks reformasi birokrasi perangkat daerah sebesar 16 poin di tahun 2021.

Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2021 mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah melalui pemetaan dengan RPJMD/Renstra Kecamatan Banjarangkan Tahun 2018-2023. Hasil pemetaan tersebut disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2

Hasil Pemetaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan RPJMD/Renstra Kecamatan Banjarangkan Tahun 2018-2023.

RPJMD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2018-2023/RENSTRA SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023				PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH								
Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kode		Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab					
		Belanja Tidak Langsung										
		Belanja Pegawai		7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	Sekretaris Kecamatan			
				7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan		
4	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	7	01	01	2.03	Administrasi Umum	Sekretaris Kecamatan		
4	1	9	1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sekretaris Kecamatan
			7			01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
4	1	9	3	Pengelolaan Kearsipan	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	7	01	01	2.03		Administrasi Umum	Sekretaris Kecamatan
			7			01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretaris Kecamatan

RPJMD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2018-2023/RENSTRA SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023					PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH							
Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kode		Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab					
				7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan		
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	7	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Sekretaris Kecamatan
						7	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
4	1	64		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	Camat Banjarangkan
4	1	64	2	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kepala Seksi Sosial dan Budaya
4	1	64	3	Kegiatan Penyelenggaraan Porsenijar Tingkat Kecamatan	Persentase Cabang Olah Raga dan Seni Yang Dipertandingkan	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Camat Banjarangkan
						7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepala Seksi Sosial dan Budaya

RPJMD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2018-2023/RENSTRA SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023					PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH							
Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kode		Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab					
4	1	64	4	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah Sesuai Standar	Persentase Sekolah Melaksanakan UKS Sesuai Standar	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kepala Seksi Sosial dan Budaya
4	1	64	5	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Camat Banjarangkan
						7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kepala Seksi Sosial dan Budaya
4	1	64	6	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Camat Banjarangkan
						7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
4	1	64	7	Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan	Buku Rekapitulasi Profil Desa dan Buku Potensi Kecamatan	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Camat Banjarangkan
						7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

RPJMD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2018-2023/RENSTRA SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023					PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH						
Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kode		Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab				
4	1	64	8	Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Bulan Lapangan Kecamatan Dalam Kondisi Baik	7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Camat Banjarangkan
									01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kepala Seksi Sosial dan Budaya
4	1	64	9	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Camat Banjarangkan
									03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
4	1	64	11	Kegiatan Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial	Data Kerawanan Sosial di Kecamatan	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Camat Banjarangkan
									01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	1	64	12	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Camat Banjarangkan
									01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

RPJMD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2018-2023/RENSTRA SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023				PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH					
Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kode		Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
4	1	65	Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Camat Banjarangkan
4	1	65	1 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	7	01	02	2.04	01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4	1	66	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Camat Banjarangkan
4	1	66	1 Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7	01	06	2.01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4	1	66	2 Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa	7	01	06	2.01	01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4	1	66	3 Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu	7	01	06	2.01	05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4	1	66	4 Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Permbdayaan masyarakat	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Camat Banjarangkan
				7	01	03	2.01	03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Banjarangkan dan RKPD Tahun 2021 maka dirancang 6 program, 13 kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 3.620.573.717,00.

Fokus masing-masing program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, memiliki fokus pada kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan penyusunan renstra dan renja perangkat daerah dan sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah, kegiatan administrasi keuangan dengan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan sub kegiatan penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran, kegiatan administrasi umum dengan sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, serta kegiatan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur dengan sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, memiliki fokus pada kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait serta sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan dengan sub kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dengan sub kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan, dan sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, berfokus pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, dan sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, memiliki fokus pada kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan sub kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, kegiatan koordinasi penerapan

dan penegakan Perda dan Perkada dengan sub kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, berfokus pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan sub kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, berfokus pada kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan sub kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, sub kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, serta sub kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Banjarangkan tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 disajikan dalam tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Klungkung

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Banjarangkan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.620.573.717,00			6.122.465.360,25	
7 01	KECAMATAN				3.620.573.717,00			6.122.465.360,25	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kecamatan Banjarangkan	16 Poin	3.245.048.217,00			16,50 Poin 5.240.152.160,25	
7 01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Tepat Waktu	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	7.326.300,00			100 Persen 12.837.000,00	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Kecamatan Banjarangkan	8 Dokumen	3.810.600,00	Dana Insentif Daerah (DID)		8 Dokumen 6.357.000,00	
7 01 01 2.01 05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Kecamatan Banjarangkan	22 Dokumen	3.515.700,00	Dana Insentif Daerah (DID)		22 Dokumen 6.480.000,00	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan	Rata-Rata Capaian Output Sub Kegiatan Administrasi Keuangan	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	2.754.769.729,00			100 Persen 2.387.882.100,25	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	2.655.737.229,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Non Infrastruktur dan PAD Non Kapitasi JKN/Non BLUD		100 Persen 2.366.794.100,25	
7 01 01 2.02 07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Kecamatan Banjarangkan	14 Dokumen	99.032.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Non Infrastruktur dan Dana Insentif Daerah (DID)		14 Dokumen 21.088.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7 01 01 2.03	Administrasi Umum	Rata-Rata Capaian Output Sub Kegiatan Administrasi Umum	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	298.475.720,00			100 Persen	2.657.316.304,00
7 01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	2.487.900,00	Dana Insentif Daerah (DID)		100 Persen	6.122.000,00
7 01 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Banjarangkan	97 Persen	295.987.820,00	Dana Insentif Daerah (DID)		97 Persen	2.651.194.304,00
7 01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Disiplin Aparatur	Kecamatan Banjarangkan	85 Persen	184.476.468,00			87 Persen	182.116.756,00
7 01 01 2.04 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelaksanaan Peraturan Kependidikan	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	184.476.468,00	Dana Insentif Daerah (DID)		100 Persen	182.116.756,00
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	202.690.600,00			100 Persen	252.124.000,00
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	134.929.600,00			100 Persen	117.243.000,00
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Persentase Sekolah Melaksanakan UKS Sesuai Standar	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	4.461.500,00	SiLPA		100 Persen	12.535.000,00
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Cabang Olah Raga dan Seni Yang Dipertandingkan Dalam Porsenijar Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	130.468.100,00	SiLPA		100 Persen	104.708.000,00
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Pemerintahan Bidang Sosial Budaya Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	8.943.800,00			100 Persen	45.873.000,00
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Koordinasi Pemerintahan Bidang Sosial Budaya Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarangkan	4 Kegiatan	8.943.800,00	SiLPA		4 Kegiatan	45.873.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Lapangan Kecamatan Dalam Kondisi Baik	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	35.110.400,00			100 Persen	35.680.000,00
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Bulan Lapangan Kecamatan Dalam Kondisi Baik	Kecamatan Banjarangkan	12 Bulan	35.110.400,00	SiLPA		12 Bulan	35.680.000,00
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	23.706.800,00			100 Persen	53.328.000,00
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	15.355.100,00	SiLPA		100 Persen	28.819.000,00
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Pemerintahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	8.351.700,00	SiLPA		100 Persen	24.509.000,00
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	82.309.900,00			100 Persen	99.072.000,00
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	82.309.900,00			100 Persen	99.072.000,00
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	1 Dokumen	13.804.600,00	SiLPA		1 Dokumen	20.653.000,00
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Posyandu di Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	68.505.300,00	SiLPA		100 Persen	78.419.000,00
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	23.789.800,00			100 Persen	48.098.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	19.927.800,00			100 Persen	39.049.000,00
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Data Kerawanan Sosial di Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	2 Data	19.927.800,00	SiLPA		2 Data	39.049.000,00
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang Disidangkan	Kecamatan Banjarangkan	0 Kasus	3.862.000,00			0 Kasus	9.049.000,00
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan Kegiatan Koordinasi/Sinergi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	3.862.000,00	SiLPA		100 Persen	9.049.000,00
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	26.443.300,00			100 Persen	353.993.000,00
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	26.443.300,00			100 Persen	353.993.000,00
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati	Kecamatan Banjarangkan	4 Kali	26.443.300,00	SiLPA		4 Kali	353.993.000,00
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	40.291.900,00			100 Persen	129.026.200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	40.291.900,00			100 Persen	129.026.200,00
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase SK Evaluasi APBDes Tepat Waktu	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	17.358.200,00	SiLPA		100 Persen	37.286.900,00
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Tertib Administrasi	Kecamatan Banjarangkan	13 Desa	12.695.000,00	SiLPA		13 Desa	64.175.600,00
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Jenis Lomba Desa Yang Diikuti	Kecamatan Banjarangkan	100 Persen	5.559.500,00	SiLPA		100 Persen	13.379.000,00
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Buku Rekapitulasi Profil Desa dan Buku Potensi Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	2 Buku	4.679.200,00	SiLPA		2 Buku	14.184.700,00

Berdasarkan tabel 3.6 diatas dapat dijelaskan bahwa rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Banjarangkan Tahun 2021 telah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program, kegiatan, sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasinya.

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2021 sebagai pedoman bagi Kecamatan Banjarangkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan penting

Yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2021 wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Banjarangkan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2021;
2. Kecamatan Banjarangkan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Banjarangkan Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2021;
3. Pada akhir tahun anggaran 2021, Kecamatan Banjarangkan wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan Program, Kecamatan Banjarangkan wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Rencana tindak lanjut

Renja Kecamatan Banjarangkan selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Banjarangkan, serta memberikan

umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Kecamatan Banjarangkan ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Klungkung.



BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA